

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ka'an Fajar Sidiq

NPP 31.0628

Asdaf Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah  
*Program Studi Kebijakan Publik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*

Email: [ahmadkaan97@gmail.com](mailto:ahmadkaan97@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dra. Pratiwi Nurhascaryani, M.Si

## ABSTRACT

**Problems (GAP):** *The increase in the amount of waste in Sukamara Regency continues to experience a significant increase, reaching its peak in 2022 with a total of 10,626.76 tonnes. It is targeted that the reduction and handling of Household Waste and Waste Similar to Household Waste can reach 30% (thirty percent) and the handling of Household Waste and Waste Similar to Household Waste reaches 70% (seventy percent) of the total generation rate. Objective: This study aims to explain the implementation of waste management in Sukamara Regency with supporting factors, obstacles, and efforts made to implement policy implementation. Methods: The research uses a qualitative method with an inductive approach with data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Results: That the implementation of waste management policies in Sukamara Regency is going well, but there are still several obstacles in the form of a lack of public awareness and understanding of waste management, which is reflected in the inherent stigma, and limited infrastructure that affects the effectiveness of policy implementation. Conclusion: Tthe Sukamara District Environmental Service continues to strive for a more strategic and comprehensive implementation of waste management.*

**Keywords:** *Implementation, Policy, Waste Management*

## ABSTRAK

**Permasalahan (GAP):** Peningkatan jumlah sampah di Kabupaten Sukamara yang terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan jumlah mencapai 10.626,76 ton. Ditargetkan pengurangan serta penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dapat mencapai sebesar 30% (tiga puluh persen) dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mencapai sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah angka timbulan. **Tujuan:** Untuk menjelaskan implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara dengan faktor pendukung, penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk melaksanakan implementasi kebijakan **Metode:** Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil:** bahwa implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Sukamara berjalan baik namun masih ada beberapa hambatan berupa kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah, yang tercermin dari masih adanya stigma yang melekat, serta keterbatasan infrastruktur yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. **Kesimpulan:** Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara terus mengupayakan implementasi pengelolaan sampah yang lebih strategis dan komprehensif.

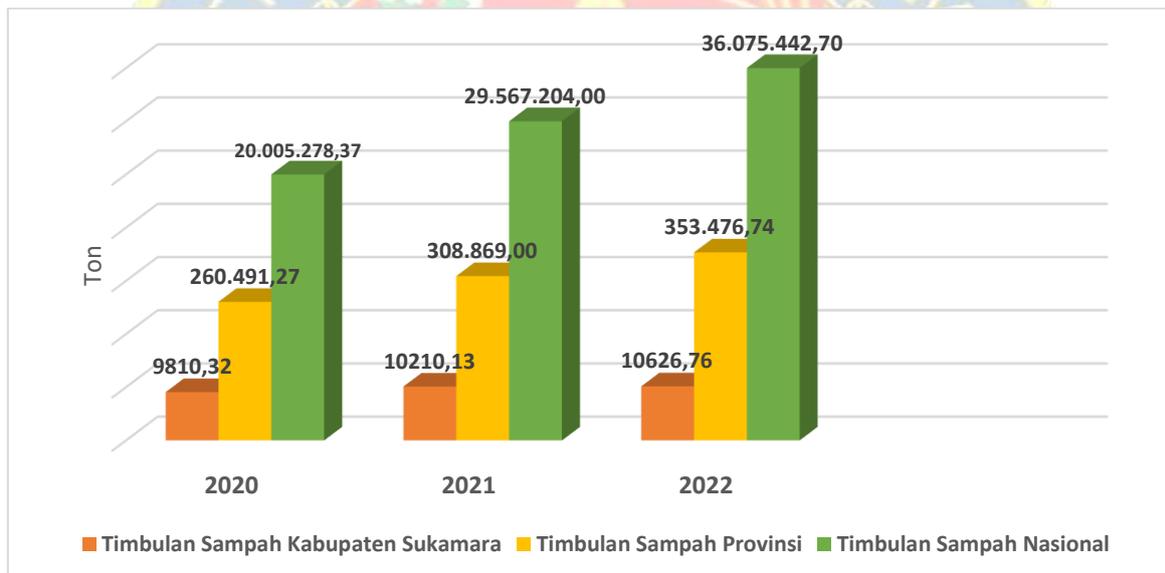
**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan, Sampah

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Terekam dalam e-Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Tahun 2022, terjadi peningkatan timbulan sampah secara signifikan sepanjang tahun 2019-2022. Puncak kenaikan pada 2022 yang mencapai 36.075.442,70 ton. Praktik pengelolaan sampah di setiap daerah tentunya berbeda-beda. Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2020-2022 ternyata tidak luput dari tantangan serupa. Dalam beberapa tahun terakhir, Kalimantan Tengah menggambarkan pertumbuhan jumlah sampah yang terus meningkat. Data menunjukkan bahwa timbulan sampah di provinsi ini ikut mengalami kenaikan seiring waktu. Ada kenaikan sebesar 92.985,37 ton sampah yang diproduksi Provinsi Kalimantan Tengah. Searah dengan data timbulan sampah nasional dan provinsi yang menunjukkan kecenderungan peningkatan yang persisten, timbulan sampah di Kabupaten Sukamara menunjukkan grafik yang serupa dengan jumlah timbulan sampah yang tergolong tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya dan tidak dibarengi pengurangan dan penanganan yang seharusnya. Ini menjadi tantangan serius dalam pengelolaan sampah di tingkat lokal dan memerlukan perhatian lebih besar dalam hal strategi pengelolaan yang berkelanjutan. Peningkatan tersebut digambarkan dalam grafik seperti berikut:

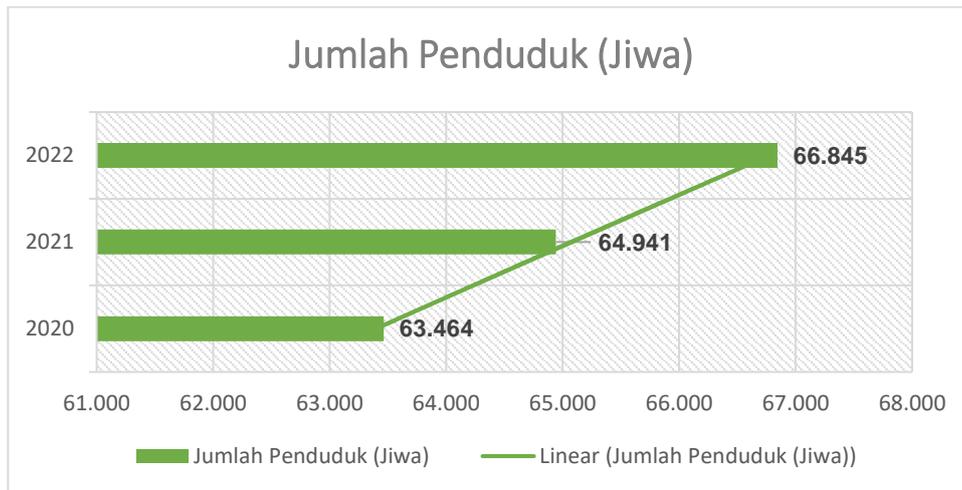
**Gambar 1.1**  
**Timbulan Sampah Tahun 2020-2022**



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2023

Dari data yang tersaji tergambar jelas bahwa ini menjadi pertanda bahwa sampah menjadi urgensi yang memerlukan adanya penerapan strategi pengelolaan sampah yang efektif. Jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukamara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 sebanyak 63.464 jiwa. Kemudian meningkat di tahun 2021 sebanyak 64.941 jiwa, dan meningkat signifikan di tahun 2022 menjadi 66.845 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang kian meningkat besar pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah timbulan sampah. Data pertumbuhan penduduk per tahun di Kabupaten Sukamara tersaji pada Gambar 1.2 berikut.

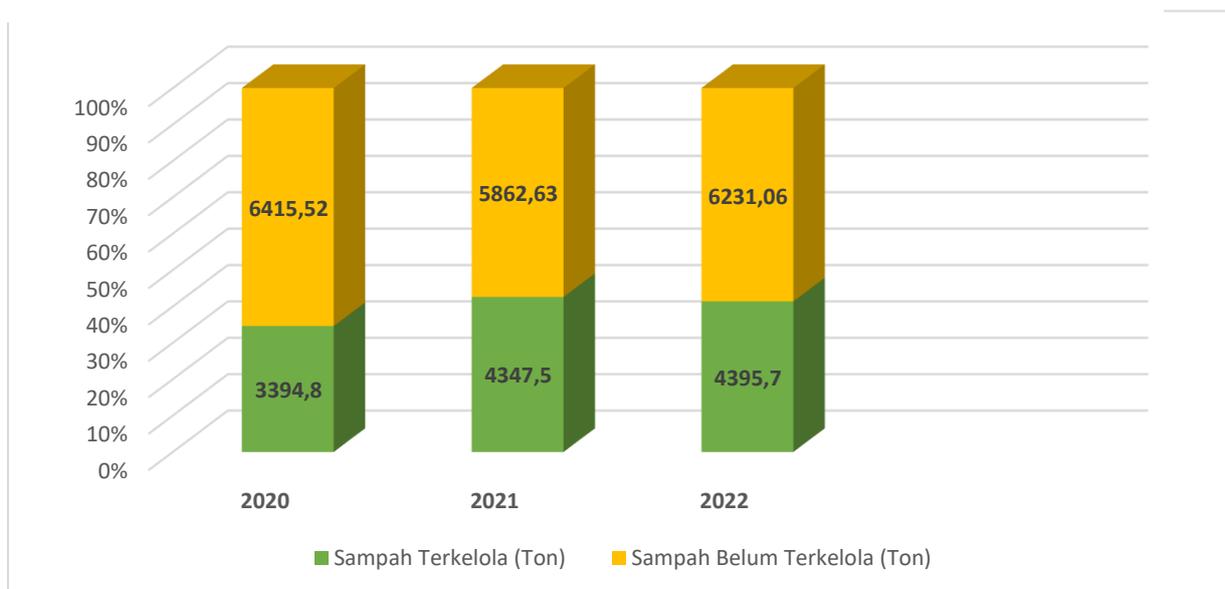
**Gambar 1.2**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2022**



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, 2023

Berdasarkan informasi diatas dapat dianalisis bahwa terjadi penambahan jumlah sampah yang diproduksi setiap orang dalam satu tahunnya. Pada 2020-2021 sampah yang diproduksi setiap orang sebanyak 3,7 ton per tahun, kemudian pada tahun 2021-2022 terjadi kenaikan produksi sampah yaitu bahwa setiap orangnya menghasilkan 4,6 toh sampah per tahun, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terjadi kenaikan sebesar 24% setaip orang dalam tiga tahun. Namun sayangnya, target ambisius Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2018 tidak dibarengi dengan implementasi yang serius. Faktanya dari total timbulan sampah yang ada, jumlah sampah yang tidak terkelola jauh lebih besar dari sampah yang dikelola. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, dilampirkan data berikut.

**Gambar 1.3**  
**Data Pengelolaan Sampah Kabupaten Sukamara**  
**Tahun 2020-2022**



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara, 2023

Aspek Kedua, ialah karena keterbatasan infrastruktur yang ada di Kabupaten Sukamara. Keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara yang dimaksud ialah terbatasnya jumlah Tempat Pengolahan Sampah dan Sisa Rumah Tangga (TPS3R). Dari lima kecamatan di Sukamara pada Tahun 2013-2022, hanya 3 Kecamatan yang memiliki TPS3R sedangkan 2 Kecamatan lainnya belum memiliki TPS3R. Ini menjadi masalah sebab 2 Kecamatan tersebut akhirnya terkendala pada pengelolaan sampah yang menimbulkan semakin banyak tumpukan sampah yang tidak dikelola. Hal ini tentu kian mengkhawatirkan. Keterbatasan infrastruktur berimplikasi pada kondisi buruknya sistem pengelolaan sampah yang menyebabkan banyaknya timbulan sampah yang tidak diolah dan dikelola.

**Tabel 1. 1**  
**Data TPS3R dan KSM Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2022**

NO	KECAMATAN	TPS3R	KSM
1	Sukamara	1 TPS3R - Permata Sukma	1 Kelompok - KSM Permata Sukma (Padang)
2	Balai Riam	1 TPS3R - Bukit Patung Jaya Bangun Jaya	1 Kelompok - KSM Bukit Patung Jaya Bangun Jaya
3	Pantai Lunci	1 TPS3R - Pantai Jaya Cabang Barat	1 Kelompok - KSM Pantai Jaya Cabang Barat
4	Kuala Jelai	Belum Memiliki	1 Kelompok - KSM AIRA Kuala Jelai
5	Permata Kecubung	Belum Memiliki	Belum Memiliki
<b>Total</b>		<b>3</b>	<b>4</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara, 2023

Dari uraian diatas data disimpulkan bahwa timbulan sampah yang ada masih jauh dari kata “terkelola”. Faktor yang melatarbelakangi minimnya pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara diantaranya sebab pertumbuhan penduduk berimplikasi pada peningkatan produksi sampah. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan memahami lebih mendalam melalui judul penelitian **”Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sukamara”**

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Timbulan sampah di Kabupaten Sukamara mencapai 10.626,76 ton pada tahun 2022 terus mengalami kenaikan seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk sebanyak 66.845 jiwa pada tahun 2022. Analisis menyebutkan bahwa terjadi kenaikan sebesar 24% ton sampah setiap orang dalam tiga tahun. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa lebih dari 50% timbulan sampah tidak terkelola dengan baik. Adapun sampah yang terkelola, proses penanganan dan pengurangannya masih belum mencapai target. Dengan demikian, kesenjangan adanya target yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Sukamara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menargetkan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah angka timbulan sedangkan dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah angka timbulan masih belum dibarengi dengan upaya pengelolaan yang optimal.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya mengulas masalah yang memiliki kemiripan topik dengan penelitian yang hendak ditulis oleh penulis. Hal tersebut dapat menjadi rujukan tambahan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian. Aktivitas masyarakat perkotaan telah menghasilkan timbulan sampah dengan presentase 70% dari total volume sampah tahunan 62 juta ton yang dipengaruhi oleh fungsi dan tingkat mobilitas kawasan kota (Fia Rahmawati & Dola Syamsu, 2021). Pengelolaan sampah dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, anggaran, sarana Prasarana dan peran pemerintah dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis bank sampah (Aan, Amustryatma. I & Kusworo, 2019). Sama halnya dalam penelitian lainnya bahwa pengelolaan sampah secara optimal dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia dan anggaran (Maryana et al., 2022). Faktor penghambat lainnya termasuk penerapan sanksi yang belum berjalan, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan kurangnya sosialisasi program (Okhtafianny & Ariani, 2023). Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong sedang, sebagian masyarakat sudah ikut berpartisipasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih didominasi oleh pihak pemerintah (Handayani & Agussalim, 2023). Adapun Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Sukabumi salah satu faktornya adalah Sebagian individu yang kurang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah (Puspita et al., 2023).

Dari ketiga penelitian tersebut disimpulkan bahwa sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam pengelolaan sampah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di TPA Kalikondang Kabupaten Demak bahwa penilaian dan analisis pengelolaan sampah terfokus hanya pada pembelian tanah dan BBM truk pengangkut sampah (Hardiyanti, 2021). Indikator efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas disebabkan oleh adanya pengoptimalan tempat pembuangan sementara (TPS) disemua wilayah di Kota Kapuas sampai di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) secara tepat waktu (Junaidy et al., 2021). Aspek sumber daya, khususnya sarana penunjang seperti kendaraan pengangkut sampah, terindikasi belum optimal (Sakir, 2023). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Indihiang menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah, dan kendala dalam koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat (Komarudin et al., 2023). Adapun inovasi Penerapan kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan DLH Kota Cimahi yaitu program Maggotisasi melalui program Gerakan Orang Cimahi Memilah Sampah (Gerak Ompipah) dan juga Bareng-bareng Mengurangi Sampah (Barengas) (Supriatna et al., 2024).

### 1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian terdahulu menjadi referensi keilmuan dan sebagai pembeda antara penelitian yang dilaksanakan penulis dan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya, sehingga dapat menggambarkan kebaruan (*novelty*) dari penelitian yang dilakukan. Kebaruan penelitian terfokus pada Kabupaten Sukamara yang belum ditemukan penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelitian besar dipengaruhi oleh kondisi Kabupaten khususnya kondisi geografis yang luas dan kondisi sosial masyarakat yang belum melek akan kesadaran sampah.

### 1.5 Tujuan

Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan permasalahan di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara.
3. Untuk mengetahui dan menggambarkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara.

## II METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif (Simangunsong, 2016). Pendekatan penelitian kualitatif juga tepat untuk digunakan dalam permasalahan yang berada dalam situasi social yang dinamis dan kompleks karena masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentative dan berkembang Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi teknik yang menggabungkan data hasil wawancara mendalam dengan 21 informan yang terpilih dengan purposive sampling, observasi pasif pada lokus penelitian, dan dokumentasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara yang berkaitan dengan implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara.

## III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara utamanya dilatarbelakangi oleh kondisi demografis. Menurut Ripley and Franklin (Winarno, 2022:148), Keberhasilan sebuah kebijakan dilihat dari 3 dimensi dengan 8 atribut sebagai indikator turunannya. Atribut-atribut inilah yang dijadikan alat ukur oleh peneliti dalam menentukan sejauh mana implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara yang tentunya dalam pelaksanaan pun tidak luput dari adanya faktor pendukung dan penghambat

### 3.1 Tingkat Kepatuhan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sukamara

Kepatuhan pelaksana menjadi salah satu penentu implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara. Kepatuhan pelaksana berpengaruh pada pencapaian tujuan kebijakan, keberlanjutan proses, pemenuhan kewajiban hukum, serta pemberdayaan pemangku kepentingan.

#### a. Perilaku pelaksana

Perilaku pelaksana dilihat dari bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sukamara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui perealisasi program pengelolaan sampah, diantaranya Program Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat yang berperan sebagai pengutip sampah rumah tangga berlangganan. Adapun kepatuhan tersebut dapat dinilai dengan adanya kontinuitas pelaksanaan program yang terpantau dari komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara dengan bentuk Kerjasama pengelolaan sampah dengan kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yaitu 6 Kelompok Swadaya Masyarakat dengan 4 empat TPS3R. Komitmen ini diwujudkan dalam pelaksanaan pendampingan dan pembinaan operasional TPS3R serta pengawasan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah.

**Tabel 4.1**  
**Data TPS3R dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kabupaten Sukamara**

No	Kecamatan	TPS3R	KSM
1	Sukamara	2 TPS3R - Permata Sukma - Green Pudu Komposindo Jaya	3 Kelompok - KSM Kecubung Sukma (Mendawai) - KSM Permata Sukma (Padang) - KSM Green Pudu Komposindo (Pudu)
2	Balai Riam	1 TPS3R - Bukit Patung Jaya Bangun Jaya	1 Kelompok - KSM Bukit Patung Jaya Bangun Jaya
3	Pantai Lunci	1 TPS3R - Pantai Jaya Cabang Barat	1 Kelompok - KSM Pantai Jaya Cabang Barat
4	Kuala Jelai	1 TPS3R - AIRA Kuala Jelai	1 Kelompok - KSM AIRA Kuala Jelai
5	Permata Kecubung	Belum Memiliki	Belum Memiliki
<b>Total</b>		<b>5</b>	<b>6</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara, 2023

Tabel diatas menyebutkan bahwa implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara dibantu dengan adanya pengaktifan kembali pelaksanaan program oleh 5 TPS3R dan 6 KSM yang tersebar di 5 Kecamatan. Ini merupakan sebuah progress pelaksanaan program dibandingkan tahun 2022. Adapun sampai saat ini pengupayaan program TPS3R dan KSM di Kecamatan Permata Kecubung masih terkendala minimnya kesadaran masyarakat dan akan terus diusahakan untuk mempelancarkan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara.

Namun secara garis besar, ini menandakan bahwa Pemerintah terus mengupayakan ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara. Keberadaan TPS3R dan KSM merupakan bentuk kepatuhan pelaksana terhadap kebijakan melalui Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara. Tindak lanjut berikutnya yang paling penting ialah memastikan kontinuitas program untuk terus berlanjut dengan baik. Maka dari itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara perlu merumuskan dan menyusun langkah selanjutnya dengan mengadakan sosialisasi tambahan setelah program dilaksanakan.

Berdasarkan uraian yang diperkuat dengan pendapat beberapa informan disimpulkan bahwa Perilaku pelaksana dilihat dari kepatuhannya dalam menjalankan tanggung jawab, tugas, dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati melalui perwujudan program pengelolaan sampah dalam sistem dan mekanisme yang telah diatur yaitu dengan adanya program TPS3R dan KSM. Implementasi dua hal tersebut tentunya tidak luput dari adanya implikasi atas kesadaran dan pemahaman terhadap urgensi pengelolaan sampah. kesadaran ini pun terbangun sebab adanya sosialisasi dan edukasi pada target sasaran yaitu pelaksana dan masyarakat. Dengan demikian diharapkan kepatuhan pelaksana juga turut membantu perencanaan implementasi kebijakan yang lebih baik dengan mempertimbangkan strategi untuk membantu pengembangan pendekatan yang lebih holistik dan efektif melalui manajemen perilaku terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara

## b. Pemahaman Pelaksana

Pemahaman terhadap kepatuhan pelaksana dalam konteks implementasi memiliki korelasi yang erat. Pemahaman yang baik terhadap kebijakan oleh pelaksana dapat berdampak positif pada Tingkat kepatuhan. Hal ini diukur dari aspek kesadaran akan pentingnya kebijakan, partisipasi aktif, dan penyuluhan sosialisasi sebagai media untuk mendalami pemahaman pelaksana. Pelibatan 5 Tempat TPS3R dan 6 Kelompok Swadaya Masyarakat dalam program pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara, harus dibarengi dengan adanya sosialisasi dan edukasi. Pemahaman pelaksana terwujud dalam lingkungan yang memiliki kesadaran tinggi. Pemahaman ini berimplikasi pada hadirnya peran partisipasi aktif pelaksana dan berbagai pihak yang berwenang dalam implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara.

Penjelasan diatas mengenai perilaku pelaksana dan pemahaman pelaksana berjalan dengan baik dan sangat signifikan, maka dari itu pencapaian tujuan kebijakan menuju Sukamara yang bersih, keberlanjutan proses dalam program TPS3R dan KSM, serta pemenuhan kewajiban hukum dalam kepatuhan Dinas Lingkungan Hidup merealisasikan maksud dan tujuan Peraturan Bupati. Hal ini menyaratkan bahwa implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara berjalan dengan baik dilihat tingkat kepatuhan pada kebijakan yang dilaksanakan.

### 3.2 Kelancaran Rutinitas Fungsi dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sukamara

#### a. Fungsi Regulasi

Fungsi regulasi memiliki peran krusial dalam kelancaran rutinitas kebijakan pengelolaan sampah sebab regulasi menjadi pondasi untuk menjalankan pengaturan standar dan prosedur sebagai bentuk kepedomanan pada tugas, fungsi, dan kewajiban peran masing-masing. Implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara didasari dengan pijakan beberapa regulasi sebagai landasan legitimasi dan acuan penyelenggaraan program. Berikut ini adalah regulasi yang dipedomani dan menjadi acuan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara.

**Gambar 4. 1**  
**Regulasi yang Mengatur Tentang Pengelolaan Sampah**

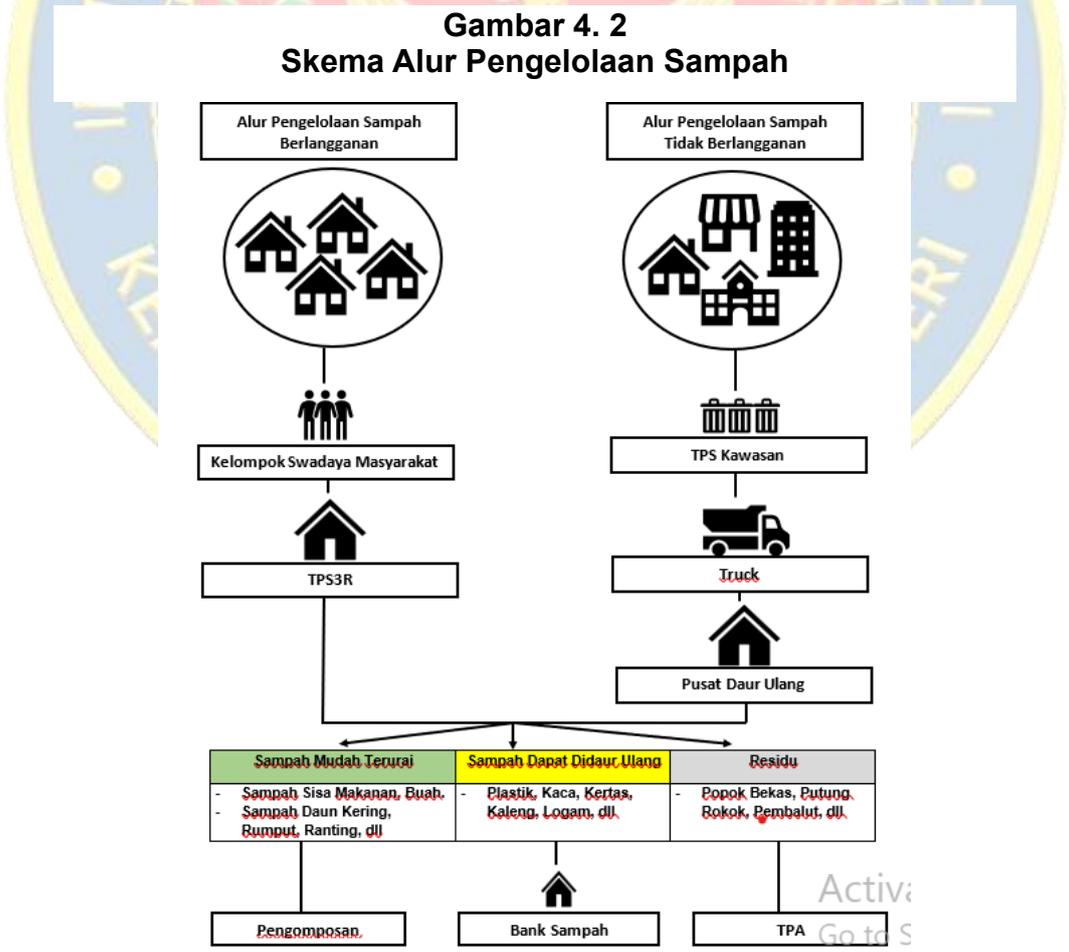


Sumber: Diolah Oleh Penulis Tahun, 2023

Regulasi menjadi kontrol dan koridor agar sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan. Sebab dalam pelaksanaannya, pengelolaan sampah harus disesuaikan dengan ketetapan standar dan sistem operasional. Hal tersebut untuk menghindari timbulnya tumpang tindih fungsi dan peran atau kewenangan ganda dalam pelaksanaannya. Berdasarkan dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwasanya dari empat narasumber menegaskan mengenai pentingnya regulasi dalam memberikan pijakan hukum yang kokoh dan kerangka kerja yang jelas bagi program-program inovatif seperti TPS3R, KSM, dan Bank Sampah. Adanya regulasi yang kuat akan menentukan berkelanjutan program yang dijalankan. Selain itu regulasi juga menunjukkan adanya kredibilitas, legitimasi, justifikasi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara yang menjadi keharusan untuk dilaksanakan secara kontinu karena permasalahan sampah bukan masalah insidental. Dengan adanya regulasi ini lah yang menjadi pijakan untuk menjalankan program selama regulasi itu berlaku dan program yang akan terus kontinu, dan rigid.

**b. Fungsi Koordinasi**

Fungsi Koordinasi pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara merupakan suatu upaya penyelarasan tugas oleh beberapa pihak yang berwenang Koordinasi yang tercipta atas peran dan tugas tersebut kemudian diturunkan dalam bentuk koordinasi teknis yang diimplementasikan dalam skema alur pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2022. Skema alur pengelolaan sampah ini melibatkan masyarakat sebagai pemilah sampah, pengumpul sampah, dan pengolah sampah. Terselenggaranya kelancaraan kegiatan ini didasari adanya tanggung jawab peran untuk menghindari tumpang tindih peran atau bentrok antar tugas. Realisasi koordinasi dalam bentuk skema alur pengelolaan sampah sebagai berikut:



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara, 2023

Dari skema alur mekanisme pengelolaan sampah diatas mencerminkan bentuk keberlanjutan proses yang diinginkan untuk mewujudkan efiseinsi dan efektivitas operasional. Maka dari itu, dari adanya skema alur ini membuktikan bahwa terbentuk fungsi koordinasi didalamnya. Fungsi koordinasi yang tersistem dalam manajemen pengelolaan sampah yang baik akan memudahkan dan memperlancar proses pencapaian tujuan dan target pengelolaan sampah.

### c. Fungsi Penegakan Hukum

Penegakkan hukum pada kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara dilaksanakan dalam pengawasan operasional sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan terkait pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara telah menetapkan langkah-langkah untuk menegakkan hukum dalam pengelolaan sampah. Bentuk penegakkan hukum yang dilakukan ialah dengan memperkuat patroli dan pengawasan, meningkatkan penyuluhan, serta memberlakukan sanksi yang tegas. Ini semua didasarkan pada pentingnya Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan sebagai aturan utama. Dengan penegakan hukum yang baik, kebijakan pengelolaan sampah bisa berjalan lebih teratur. Namun, Persoalan Penegakan hukum di Kabupaten Sukamara terkait pengelolaan sampah tetap saja masih menjadi tantangan tersendiri mengingat masih ada masalah dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan kurangnya kesadaran akan pentingnya membuang sampah dengan benar.

Dari penjabaran ketiga atribut diatas, dapat disimpulkan bahwa kelancaran rutinitas fungsi dalam implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan adanya fungsi regulasi yang menjadi dasar legitimasi pelaksanaan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan pendamping lainnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sampah). Terselenggaranya fungsi koordinasi yang dilihat dari adanya komunikasi efektif dalam skema alur mekanisme pengelolaan sampah. Serta jalannya fungsi penegakkan hukum sebagai tindak lanjutan terhadap Upaya penegakan amanat regulasi mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara. Dengan begitu rutinitas implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara terus berjalan kontinu dengan berfungsinya peran regulasi, koordinasi, dan penegakkan hukum.

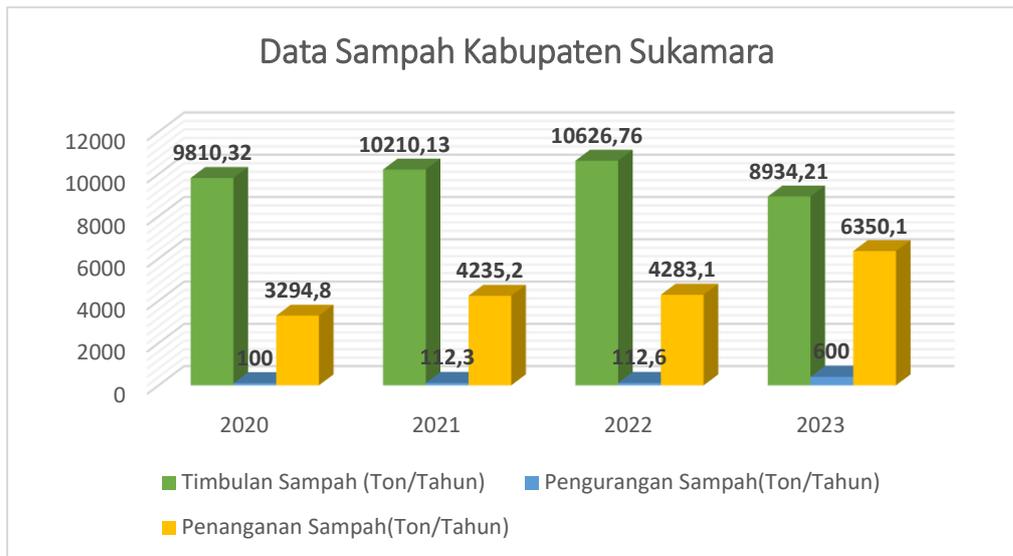
## 3.3 Keterwujudan Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sukamara

Tercapainya tujuan atau *output* tidak lepas dari input dan proses yang dilaksanakan. begitu halnya untuk mendapatkan output, mewujudkan Kabupaten Sukamara yang bersih, maka ada proses implementasi pengelolaan sampah yang menjadi prasyarat utama. Implementasi ini merupakan cara untuk merealisasikan program lingkungan hidup yaitu pengelolaan sampah. Adapun dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai realisasi program, faktor penentu keberhasilan, dan hambatan-hambatan.

### a. Realisasi Program

Program yang tercapai merupakan hasil dari sebuah pertimbangan perencanaan yang terarah. Dalam realisasinya komponen yang dibutuhkan meliputi penetapan tujuan yang jelas, strategi pelaksanaan, alokasi sumber daya yang memadai, serta penentuan indikator kinerja yang dapat diukur untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan. Realisasi program juga dapat dilihat dari adanya partisipasi masyarakat yang disertai dengan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara. Realisasi program tidak hanya dilihat dari adanya partisipasi masyarakat, tapi juga pencapaian target yang telah ditetapkan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa Kabupaten Sukamara sudah mengalami kemajuan dalam pengelolaan sampah. Target ambisius tersebut sudah dibarengi dengan implementasi yang serius. Hal ini dibuktikan melalui diagram batang sebagai berikut:

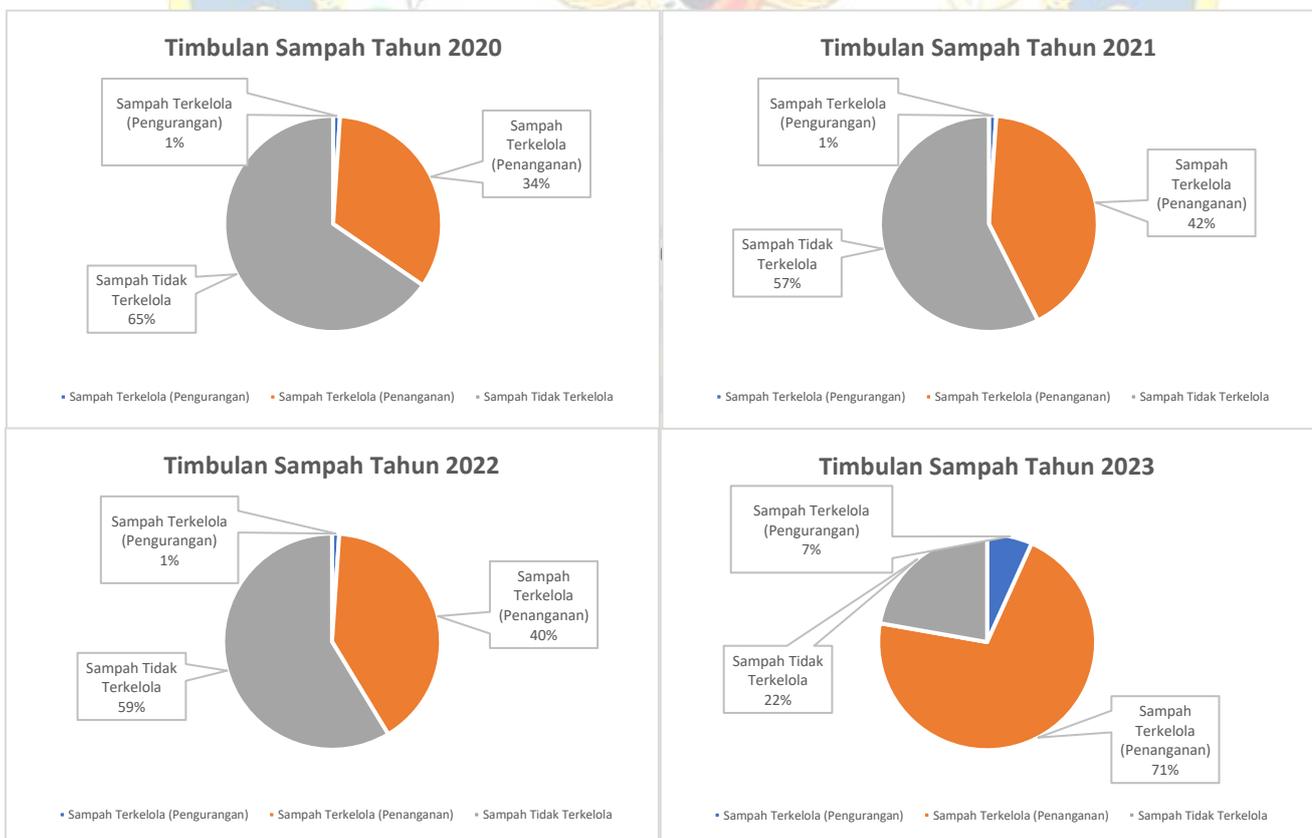
**Tabel 4. 1**  
**Data Pengelolaan Sampah Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2023**



Sumber: : (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara, 2023)

Berdasarkan data yang diperoleh, pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara telah menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, kemajuan ini tidak tercermin dalam aspek pengurangan sampah, di mana pada tahun 2023 pengurangan sampah masih belum memenuhi target yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat pada diagram pie sebagai berikut:

**Gambar 4. 3**  
**Data Pengurangan dan Penanganan Sampah Kabupaten Sukamara Tahun 2023**



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara, 2023

Berdasarkan data yang tersedia, peningkatan terhadap sampah yang terkelola lebih tinggi daripada sampah yang tidak terkelola pada tahun 2023. Terlihat bahwa persentase sampah tidak terkelola hanya 22% dari jumlah timbulan sampah yang ada. Pengelolaan sampah berjalan dengan baik terlihat dari penanganan sampah yang telah mencapai 71% dari total sampah yang dihasilkan. Capaian ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2018, yang menetapkan target penanganan sampah sebesar 70%. Namun, tingkat pengurangan sampah baru mencapai 6%, yang masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu 30% dari total sampah yang dihasilkan. Hal ini menjadi tantangan bagi Kabupaten Sukamara untuk mengoptimalkan Pengurangan Sampah.

## b. Faktor Penentu Keberhasilan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa faktor penentu keberhasilan implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara condong dipengaruhi oleh diantaranya adanya komitmen, partisipasi dan kesadaran, infrastruktur yang memadai, Kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak.

### 1. Komitmen dan Kesadaran Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat dalam program-program pengelolaan sampah sangatlah penting. Seperti halnya komitmen yang diwujudkan masyarakat melalui pembentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang turut berperan aktif mengelola sampah dengan modal sukarela (*Volunteer*). Di Tahun 2023 kesadaran masyarakat dan kepeduliannya mengenai pengelolaan sampah mengalami peningkatan yang baik. Hal ini dilihat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang berlangganan dengan kutipan sampah berbayar.

**Tabel 4.2**  
**Tabel Masyarakat Berlangganan Pengelolaan Sampah Tahun 2023**

No	Kecamatan	Masyarakat Berlangganan	
		Juni 2023	Desember 2023
1	Sukamara	336	630
2	Balai Riam	296	335
3	Pantai Lunci	46	46
4	Kuala Jelai	73	93
5	Permata Kecubung	-	-
<b>Total</b>		<b>751</b>	<b>1104</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara, 2023

Dari tabel diatas didapati bahwa dengan bertambahnya jumlah masyarakat yang berlangganan mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengondisikan sampahnya juga meningkat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat sebagai kunci dalam implementasi pengelolaan sampah dan merupakan penyumbang sektor produsen sampah perlu terus diedukasi dan diberi pemahaman agar tercipta kesadaran masyarakat yang lebih massif dan menyeluruh.

### 2. Infrastruktur yang memadai

Infrastruktur yang memadai juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan sampah yang efektif. Keberadaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang Ramah Lingkungan (TPS3R) sangatlah penting. Infrastruktur yang baik akan membantu dalam pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan terkontrol. Adapun Infrastruktur penunjang pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara mengalami peningkatan dari tahun 2022 -2023. Untuk gambaran lebih jelas dilampirkan data berikut:

**Tabel 4.3**  
**Infrastruktur Pengelolaan Sampah Kabupaten Sukamara Tahun 2023**

<b>Infrastruktur Penunjang Pengelolaan Sampah Kabupaten Sukamara Tahun 2023</b>									
<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Alat Cacah Kompos</b>		<b>Alat Cacah Plastik</b>		<b>Alat Press</b>		<b>Rotari Clian</b>	
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Sukamara	2 unit	2 unit	1 unit	3 unit	1 unit	1 unit	-	2 unit
2	Balai Riam	1 unit	1 unit	-	-	-	1 unit	-	-
3	Pantai Lunci	1 unit	1 unit	-	-	-	1 unit (Manual)	-	-
4	Kuala Jelai	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-	-
5	Permata Kecubung	-	-	-	-	-	-	-	-

**Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara. 2023**

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa ketersediaan infrastruktur sebagai faktor penunjang implementasi terus digarap dan ditingkatkan secara bertahap dari tahun ke tahunnya. Ketersediaan infrastuktur ini memfasilitasi dan mengakomodir implementasi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya peningkatan infrastruktur baik secara kualitas dan kuantitas infrastuktur pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara diharapkan semakin memudahkan dan memperlanjar pencapaian tujuan kebijakan pengelolaan sampah.

### 3. Keterlibatan Pemerintah dan Lembaga Terkait

Keterlibatan pemerintah dan lembaga terkait juga menjadi faktor krusial dalam keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah. Pemerintah perlu memastikan adanya regulasi yang jelas dan efektif terkait pengelolaan sampah, serta alokasi dana yang memadai untuk program-program pengelolaan sampah. Contoh nyata adalah ketika pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk membangun fasilitas daur ulang dan mengadakan pelatihan bagi masyarakat terkait pengelolaan sampah. selain itu Pemerintah perlu mengambil peran proaktif dalam menyediakan regulasi yang memadai dan mendukung serta memberikan insentif bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sampah. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, perusahaan, organisasi non-profit, dan masyarakat sipil juga sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam upaya pengelolaan sampah.

#### c. Hambatan-hambatan

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah dihadapi oleh sejumlah hambatan yang kompleks. keterbatasan infrastruktur dan stigma masyarakat menjadi sebab adanya hambatan dalam implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara. Pertama, Keterbatasan Infrastuktur memang menjadi salah satu hambatan utama dalam pengelolaan sampah. Infrastruktur yang kurang memadai, bahkan masih ada beberapa kecamatan yang belum memiliki fasilitas yang mendukung seperti sistem pengangkutan sampah dan fasilitas pengolahan, telah menjadi tantangan yang nyata bagi Kabupaten Sukamara.

Salah satunya adalah masih ada beberapa wilayah, seperti Kecamatan Permata Kecubung, yang menghadapi kendala dalam memiliki Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang Ramah Lingkungan (TPS3R) dan kekurangan keterlibatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan sampah. Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah bekerja keras untuk meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah. Meskipun masih ada kekurangan dalam hal alat cacah dan alat

press sampah, namun kondisinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Data menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan timbunan sampah, namun jumlahnya tetap stabil dan lebih terkendali.

Kedua, Stigma masyarakat tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah menjadi hambatan. Masyarakat menganggap bahwa kelompok pengelola dan pemanfaat (KPP) sudah dibayar untuk tugas mereka dalam mengelola sampah tidak sepenuhnya salah, tetapi mempersempit perspektif tentang tanggung jawab pengelolaan sampah secara keseluruhan. Meskipun KPP atau KSM bertanggung jawab langsung atas pengelolaan sampah di wilayah mereka, pengelolaan sampah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat dan pemerintah. Mengalihkan tanggung jawab sepenuhnya kepada KPP atau KSM bisa membuat masyarakat menjadi kurang peduli terhadap masalah lingkungan ini. Pengelolaan sampah tidak hanya tentang pengumpulan dan pengolahan sampah, tetapi juga tentang pencegahan, pengurangan, dan daur ulang sampah. Hal ini memerlukan keterlibatan semua pihak, termasuk individu, bisnis, dan lembaga pemerintah, serta KPP.

### **3.4 Faktor pendukung dan penghambat Impementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sukamara**

#### **Faktor Pendukung**

1. Memiliki Petunjuk Teknis/Alur SOP yang jelas dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah.  
Petunjuk teknis/SOP merupakan panduan operasional yang menjadi landasan bagi pelaksanaan di lapangan dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah. Dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2022 serta Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2018, teknis pengelolaan sampah telah diatur dengan rinci dan terperinci, memberikan kerangka kerja yang jelas bagi para pelaku di lapangan.
2. Pegawai/UPT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara memiliki Pemahaman dan Kesadaran dalam pengelolaan sampah.  
memiliki *background* pendidikan dan sertifikasi pelatihan mengenai pemahaman dan keahlian terhadap masalah lingkungan terutama terkait pengelolaan sampah, meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaan, sehingga proses pengelolaan sampah dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan berkualitas. Ketiga, dengan melakukan inovasi dalam pengelolaan sampah, seperti pengembangan program-program pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan atau penerapan teknologi yang lebih canggih.
3. Komunikasi dan koordinasi yang efektif baik dengan pihak internal maupun eksternal dalam pengelolaan sampah.  
Pertama, interaksi dengan pemerintah pusat, Dinas Lingkungan Hidup secara rutin mengadakan pertemuan koordinasi dengan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dari daerah-daerah lain yang memiliki masalah serupa dalam pengelolaan sampah. Kedua, berkoordinasi dengan instansi lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup memandangnya sebagai pilar utama dalam memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah. Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup aktif menerima masukan dan pengaduan dari masyarakat melalui berbagai platform, sementara juga melakukan koordinasi yang erat dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

#### **Faktor Penghambat**

1. Stigma masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran dan pemahaman mengenai pengelolaan sampah.

Bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Hal ini tercermin dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah, kurangnya kepatuhan terhadap jadwal pembuangan sampah, dan masih adanya kegiatan pembuangan sampah di tempat-tempat yang tidak semestinya seperti TPS liar.

## 2. Keterbatasan Infrastruktur

Kabupaten Sukamara saat ini di Kabupaten Sukamara terdapat 5 kecamatan dengan terdapat 4 TPS-3R yang aktif yaitu 2 di Kecamatan Sukamara, 1 di Kecamatan Balai Riam, dan 1 di Kecamatan Pantai Lunci. Jumlah tersebut masih terbilang sangat kurang karena kurang mewadahi pengelolaan sampah di 2 kecamatan lainnya. Selain fasilitas teknologi penunjang pengelolaan sampah seperti alat cacah, alat press, maupun truck atau kendaraan pick up yang hanya tersedia di beberapa kecamatan. Hanya berada di 2 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Sukamara dan Kecamatan Balai Riam.

### 3.5 Upaya Peningkatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sukamara

1. Memfokuskan anggaran ke pengelolaan sampah, seperti pembangunan atau pemeliharaan fasilitas pengolahan dan pengangkutan sampah.
2. Bekerja sama dengan pemerintah Pusat dalam pemenuhan infrastruktur, kerjasama ini dapat membawa manfaat besar, termasuk bantuan dalam bentuk dana atau teknis.

### Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam Penelitian ini menemukan bahwa timbulan sampah di Kabupaten Sukamara hanya 8.934,21 ton jauh berbeda dari rata rata timbulan sampah di perkotaan yang menyatakan bahwa Aktivitas masyarakat perkotaan telah menghasilkan timbulan sampah dengan presentase 70% dari total volume sampah tahunan 62 juta ton (Fia Rahmawati & Dola Syamsu, 2021). Pengelolaan sampah dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, anggaran, sarana Prasarana dan peran pemerintah (Aan, Amustryatma. I & Kusworo, 2019). Selain itu rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan kurangnya sosialisasi program menjadi penghambat dalam pengelolaan sampah (Okhtafianny & Ariani, 2023). Namun, dalam pelaksanaannya masih didominasi oleh pihak pemerintah (Handayani & Agussalim, 2023). Adapun dalam penelitian ini hambatan yang ditemukan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten sukamara ialah Stigma masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran dan pemahaman mengenai pengelolaan sampah. dan ketebatasan infrastruktur. Dengan demikian yang perlu diupayakan untuk mengatasi hambatan ini ialah Memfokuskan anggaran ke pengelolaan sampah dan Bekerja sama dengan pemerintah Pusat dalam pemenuhan infrastruktur

## IV KESIMPULAN

Bahwa dari hasil analisis dengan menggunakan teori Ripley Franklin implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara memenuhi indicator pelaksanaan dan dinilai baik dilihat dari perspektif tingkat kepatuhan pada kebijakan yang dilaksanakan dengan melihat perilaku pelaksana dan pemahaman pelaksana, kelancaran rutinitas fungsi dalam implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara berjalan dengan baik dan kontinuitas. realisasi program pengelolaan sampah melalui tercapainya pelaksanaan rencana dengan laporan hasil yang signifikan, meningkatnya kesadaran masyarakat yang merupakan faktor utama penentu keberhasilan, dan mengenali hambatan implementasi. beberapa saran yang dapat diimplementasikan sebagai langkah selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara perlu melakukan program edukasi intensif, memperbaiki dan meningkatkan fasilitas pendukung yang masih kurang, seperti alat pengangkut sampah dan mesin press, dan melaksanakan evaluasi rutin untuk mengatasi masalah dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara.

### Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas waktu dan biaya sehingga beberapa kegiatan tidak dapat diobservasi secara optimal sebab penjadwalan yang dilaksanakan diluar waktu penelitiann dan lokasi observasi lainnya yang jauh dan tidak terjangkau dari Ibukota Kabupaten Sukamara

### Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)

Perlu adanya kelanjutan penelitian untuk menganalisis keberhasilan dan keberlanjutan semua program yang diuraikan diatas untuk memantau perkembangan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sukamara.

## V UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih diucapkan kepada seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara yang telah membantu dan memberikan kesempatan dalam ruang dan waktu untuk menyukseskan proses penelitian dan pengamatan ini.

## VI DAFTAR PUSTAKA

- Aan, Amustryatma. I, N., & Kusworo, S. (2019). Efektivitas Kebijakan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Bank Sampah Di Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 11(4), 537–550.
- Fia Rahmawati, A., & Dola Syamsu, F. (2021). Analisis Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Pada Wilayah Perkotaan Di Indonesia. In *Maret* (Vol. 8, Issue 1).
- Handayani, D. N., & Agussalim, A. (2023). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Gorontalo. *Komunitas*, 14(1), 60–70. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v14i1.6145>
- Hardiyanti, K. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Tpa Kalikondang Kabupaten Demak. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 1(3), Layouting. <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i3.10506>
- Junaidy, J., Sugiannor, S., Anhar, D., Hamdie, A. N., & Saddiq, S. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kapuas. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 40. <https://doi.org/10.31602/as.v6i2.5506>
- Komarudin, A., Rosmajudi, A., & Hilman, A. (2023). Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal Of Education And Humanity*, 3.
- Okhtafianny, T., & Ariani, R. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3n2.2837>
- Puspita, K. A., Rachmawati, I., & Sampurna, H. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat Di Kota Sukabumi. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 1–11. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5807>
- Sakir, A. R. (2023). Pada Pasar Mardika Kota Ambon. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 3(2), 2023. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK>
- Supriatna, C., Susniwati, S., & Wiradiputra, I. A. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(1), 63. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v24i1.4133>
- Winarno. (2021). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Sukamara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara. (2022).
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2022)
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. (2022). *Timbulan Sampah Provinsi Kalimantan Tengah*. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung:Alfabeta

